BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Surat Keputusan Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011 secara substansial telah mencederai hak-hak dasar kelompok Ahmadiyah. Sebagai upaya perlindungan terhadap kelompok minoritas, SK ini justru semakin menempatkan kelompok Ahmadiyah dalam posisi yang rentan terhadap serangan kelompok mayoritas di luar Ahmadiyah. Perlindungan dengan menerbitkan peraturan diskriminatif tersebut lebih layak disebut sebagai penindasan kelompok. Meskipun secara konstitusional negara menjamin kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah, namun faktanya kelompok Ahmadiyah masih belum leluasa mengamalkan dan mengembangkan agama dan keyakinan mereka. Ironisnya, munculnya perlakuan diskriminatif ini justru dilakukan oleh negara melalui penerbitan serangkaian peraturan yang kemudian dijadikan justifikasi oleh kelompok mayoritas untuk memusuhi dan meminggirkan kelompok minoritas.
2. Di dalam internal Ahmadiyah, kelompok ini juga menerapkan pembatasan internal terhadap kelompoknya. Bentuk pembatasan tersebut adalah dengan syarat baiat, pernikahan dengan sesama anggota Ahmadiyah, dan larangan bermakmum dengan orang-orang ghair Ahmadiyah. Pembatasan yang dilakukan oleh Ahmadiyah ini menjadi wajar karena hal ini bertujuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan kebudayaan atas nama solidaritas kelompok. Penerapan pembatasan ini juga tidak bertentangan dengan hak-hak individu kelompok Ahmadiyah karena tidak didukung instrumen hukum atau kebijakan pemerintah. Selain itu, pembatasan kelompok Ahmadiyah juga tidak menimbulkan provokasi agar melawan pemerintah karena salah satu prinsipnya adalah taat pada *ūlil amri.*

B. Saran-Saran

Setelah mencermati SK Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah di Jawa Timur terhadap kehidupan keberagamaan kelompok Ahmadiyah, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu dikembangkan upaya dialogis antara kelompok Ahmadiyah dengan pemerintah secara seimbang atau netral sehingga dapat merumuskan peraturan yang tidak bersifat diskriminatif.
2. Kebijakan pemerintah daerah seharusnya tidak mereduksi atau bahkan berlawanan dengan aturan pemerintah yang derajatnya lebih tinggi seperti SKB atau bahkan UUD 1945.
3. Upaya sosialisasi produk hukum secara utuh sangat diperlukan demi tercapainya kehidupan keberagamaan yang harmonis tanpa adanya prasangka dari salah satu kelompok.
4. Perlu adanya reformasi keanggotaan MUI dengan menyertakan kelompok-kelompok organisasi Islam lainnya jika MUI mampu menjadi rujukan dalam penerbitan kebijakan pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut yang tepatnya lebih kritis, transformatif, dan mampu untuk melengkapi beberapa titik kelemahan dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id